

STRATEGIC RE-ALIGNMENT:¹
ALTERNATIF INDONESIA DALAM MENGIMBANGI ANCAMAN
ALIANSI FIVE POWERS DEFENSE ARRANGEMENT (FPDA)

STRATEGIC RE-ALIGNMENT:
ALTERNATIVES FOR INDONESIA IN BALANCING FIVE POWERS
DEFENSE ARRANGEMENT (FPDA) ALLIANCE THREAT

Ian Montratama²

Institute for Defense and Strategic Research
(montratama@idsr-indonesia.com)

Abstrak – Aliansi merupakan pilihan suatu negara untuk meningkatkan kekuatan relatif dalam menghadapi ancaman yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan internal. Malaysia dalam aliansi FPDA telah menjadi ancaman yang tidak seimbang bagi Indonesia. Namun, Indonesia sendiri tidak mungkin membentuk kontra aliansi karena kebijakan politik luar negeri bebas aktifnya. Esai ini ditujukan untuk mengkaji potensi *alignment* (selain aliansi, seperti : koalisi, kemitraan strategis dan komunitas keamanan) untuk mengimbangi ancaman kekuatan aliansi Malaysia dalam FPDA yang dianggap mengganggu kepentingan nasional Indonesia.

Kata Kunci: *strategic re-allignment, aliansi, koalisi, komunitas keamanan, kemitraan strategis*

Abstract – *Alliance is a state choice to leverage its relative power against threat that can not be overcome by internal power. Malaysia within FPDA alliance had become an imbalance threat for Indonesia. However, Indonesia can not construct counter-alliance due to her free-and-active foreign policy. This essay is intended to analyze the potent of alignment (other than alliance, such as : coalition, strategic partnership and security community) to balance threat of Malaysian alliance force within FPDA, which is considered threathening national interest of Indonesia.*

Keywords: *strategic re-allignment, alliance, coalition, security community, strategic partnership*

Pendahuluan

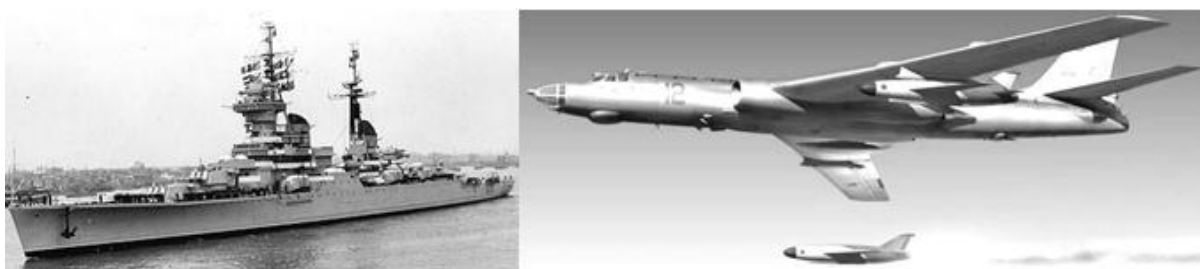
Five Powers Defense Arrangement(FPDA) adalah bentuk aliansi pertahanan antara 5 (lima) negara, yaitu Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura yang berdiri sejak

¹ Strategic Re-Alignment adalah suatu kerja sama baik bilateral maupun multilateral untuk mencapai tujuan bersama dan dalam menghadapi ancaman bersama. Penulis belum menemukan padanan kata atau terjemahan yang sesuai untuk Strategic Re-Alignmenmt dalam bahasa Indonesia.

² Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han) adalah lulusan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan tahun 2014 yang sekarang sedang melanjutkan studi di prodi S3 HI Unpad dan aktif sebagai peneliti di IDSR dengan spesialisasi di bidang komparasi alutsista dan foederologi.

tahun 1971. Aliansi ini didirikan sebagai respon dari situasi geopolitik di masa tahun 1960-an dimana terjadi konfrontasi antara Indonesia menghadapi Malaysia dan Singapura.³ Kala itu, Malaysia dan Singapura memiliki kekuatan pertahanan udara yang lemah dan berhadapan dengan Indonesia yang memiliki kekuatan militer terkuat di kawasan Asia Tenggara. Kala itu Indonesia memiliki hubungan politik yang sangat baik dengan Uni Soviet. Indonesia mampu mengimpor berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) unggulan, seperti pesawat pembom strategis Tu-16 Badger yang dilengkapi dengan *stand-off anti-ship missile* AS-1 Kennel, kapal perang penjelajah kelas KRI Irian, kapal selam kelas Whisky, rudal anti pesawat jarak menengah SA-2, dan lain sebagainya. Namun di era rezim Soeharto, Indonesia merubah politik luar negerinya dengan menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura serta lebih mendekatkan diri ke Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya).⁴ Walaupun politik luar negeri Indonesia telah berubah, namun aliansi FPDA tidak kemudian dibubarkan. Kelima negara masih menganggap perlunya mempertahankan FPDA dalam menghadapi ancaman bersama hingga sekarang.⁵

Gambar 1. KRI Irian dan pembom strategis Tu-16KS Badger dengan rudal AS-1 Kennel



Sumber: <https://panjicero.files.wordpress.com/2011/12/tu16-badger-russia.jpg>; dan <http://beritapopulis.files.wordpress.com/2008/12/kri-irian-2.jpg>

Stephen Walt dengan teori *Balance of Threat* (BOT)⁶-nya berpendapat bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan ancaman (dari negara atau koalisi negara lain), suatu negara akan membangun aliansi atau meningkatkan kemampuan internal untuk mengurangi kerawanannya (*vulnerability*). Gabungan kekuatan eksternal dalam aliansi akan mengatasi kelemahan negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari negara

³ C.A. Thayer, "The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever", *Security Challenges*, Vol. 3, No. 1, February 2007.

⁴ <https://sejarahperang.wordpress.com/2011/04/23/1237/>, diunduh pada 17 Desember 2014.

⁵ Thayer, *op.cit.*

⁶ Stephen Walt, *The Origin of Alliances*, (Ithaca: Cornell University Press, 1987).

(atau koalisi negara lain). Bagi Malaysia dan Singapura, Indonesia dianggap sebagai negara ancaman signifikan yang harus dihadapi secara multilateral dengan kekuatan eksternal. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, FPDA dapat dianggap sebagai ancaman yang tidak seimbang (*imbalance threat*). Kekuatan militer aliansi dalam FPDA jauh lebih besar dari kekuatan militer Indonesia. Sudah selayaknya Indonesia melakukan upaya-upaya tertentu untuk mengimbangi ancaman tersebut.

Five Powers Defense Arrangement (FPDA)

Thayer⁷ berpendapat bahwa dalam terminologi militer konvensional, FPDA memiliki peran sebagai *psychological deterrent* pada potensi musuh. Dengan adanya aliansi, kekuatan suatu negara akan bertambah sesuai dengan kekuatan gabungan dari negara-negara anggota aliansi tersebut. Secara psikologis, gabungan kekuatan itu akan menimbulkan efek deteren atau rasa takut bagi potensi lawan yang bermaksud menyerang salah satu negara anggota aliansi.

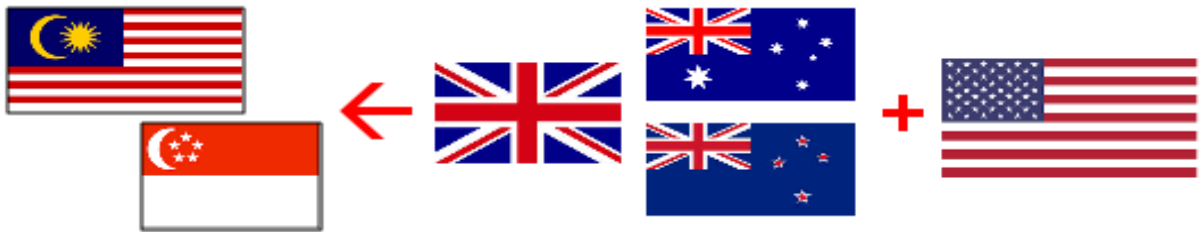
Masih menurut Thayer⁸, lawan yang berencana menyerang Malaysia atau Singapura harus mempertimbangkan respon dari Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Jika Australia dan Inggris terlibat konflik, lawan juga harus mengkalkulasi kekuatan Amerika Serikat yang mungkin melibatkan diri untuk membantu negara sekutunya. Dalam komunique pendirian FPDA (16 April 1971) telah disepakati bahwa⁹: “terkait pertahanan eksternal Malaysia dan Singapura, manakala terjadi serangan bersenjata terorganisir atau terdukung, atau ancaman serangan tersebut terhadap Malaysia atau Singapura, pemerintah negara tersebut akan segera mengkonsultasikan bersama, tujuan dari keputusan yang seharusnya diambil atau sebagian diambil sehubungan dengan serangan atau ancaman tersebut.” Komunique ini menunjukkan suatu komitmen Inggris, Australia dan Selandia Baru dalam mendukung Malaysia dan Singapura, jika kedua negara menghadapi ancaman serius.

⁷ Carlyle A. Thayer, *op.cit.*, hlm. 75-96.

⁸ *Ibid.*

⁹ Naskah asli dalam komunique pendirian FPDA: “*in relation to the external defense of Malaysia and Singapore, that in the event of any form of armed attack externally organized or supported, or the threat of such attack against Malaysia or Singapore, their governments would immediately consult together for the purpose of deciding what measures should be taken or separately in relation to such an attack or threat*”.

Gambar 2. Potensi Kekuatan FPDA



Melawan Malaysia dan/atau Singapura berarti melawan Inggris, Australia atau Selandia Baru. Melawan Inggris dan/atau Australia berarti mengundang Amerika Serikat untuk terlibat dalam konflik.

Sumber: gambar diolah sendiri oleh penulis.

Aliansi sebagai Ancaman

Benson, Bentley, dan Ray dari Universitas Vanderbilt¹⁰ berpendapat ada 2 (dua) jenis aliansi, yaitu: *conditional deterrent alliance* dan *unconditional deterrent alliance*. Pada *conditional alliance*, dukungan negara anggota terhadap negara anggota lain tidaklah mutlak. Ada alasan bagi anggota aliansi untuk menolak membantu negara anggota lain yang sedang menghadapi ancaman eksternal. Sedang pada *unconditional deterrent alliance*, negara anggota akan selalu mendapat dukungan militer dari negara anggota aliansi lainnya saat terlibat konflik dengan negara lain (tidak peduli penyebab konflik tersebut adalah sesuatu yang bersifat *unjust* atau secara moral salah).

Benson et al.¹¹ juga berpendapat bahwa negara anggota aliansi cenderung berperilaku yang membahayakan (*moral hazard*). Hal ini dikarenakan ekspektasi bantuan eksternal yang relatif tinggi dalam aliansi. Ekspektasi bantuan eksternal ini menumbuhkan persepsi bahwa negara yang beraliansi lebih kuat dari negara ancaman. Persepsi kekuatan lebih ini dapat memicu perilaku agresif berlebihan dalam menghadapi situasi konflik. Negara beraliansi tersebut berasumsi, manakala situasi *hostile* tereskalasi menjadi konflik bersenjata, kemenangan pasti berada di pihak kekuatan aliansi.

Pendapat serupa dikemukakan Snyder¹² bahwa ikatan aliansi yang bersifat *unconditional* cenderung meningkatkan eskalasi konflik. Hal ini dikarenakan ancaman dari negara lain otomatis dianggap sebagai ancaman bagi seluruh negara anggota aliansi

¹⁰ B.V Benson, P.R. Bentley, J.L. Ray, "Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave", *Journal of Peace Research*, Januari 2013, Vol. 50, No. 1. hlm. 47-58.

¹¹ *Ibid.*

¹² G. H. Snyder, *Alliance Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1997).

(yang harus dihadapi bersama). Karena jika tidak segera dilakukan tindakan, dikhawatirkan kredibilitas aliansi sebagai *psychological deterrent* (kepada potensi lawan) menjadi tidak efektif. Menurut Zagare dan Kilgour¹³ (yang juga didukung pendapat Jervis),¹⁴ strategi deterren yang efektif adalah yang mampu menunjukkan kekuatan (*capability*) dan kemauan (*willingness*)-nya untuk berperang. Menurut penulis dalam tesis di Universitas Pertahanan Indonesia,¹⁵ jika musuh mempersepsikan kekuatan suatu negara lemah, walaupun kekuatan negara itu kuat, maka musuh tidak segan untuk berkonflik. Demikian juga jika musuh mempersepsikan kemauan suatu negara untuk berperang lemah, walaupun kekuatan negara itu kuat, maka musuh juga tidak segan untuk berkonflik. Sehingga strategi harus dibangun dengan menyiapkan kekuatan yang *decisive* (menentukan), disertai dengan penyiapan kemampuan menggunakan kekuatan tersebut, penggelaran kekuatan (*military forces deployment*) dan komunikasi yang efektif pada potensi lawan, bahwa negara tersebut memiliki kemauan untuk menggunakan kekuatannya jika diperlukan.

Malaysia dan Ambalat

Fenomena keagresifan negara anggota aliansi ditunjukkan Malaysia kepada Indonesia dalam konteks sengketa blok laut Ambalat. Informasi yang dikumpulkan penulis dalam tesisnya¹⁶ menunjukkan bahwa pihak militer dan polisi laut (*marine police*) Malaysia telah melakukan banyak gangguan atas kedaulatan Indonesia, antara lain :

- Peristiwa gangguan pembuatan mercusuar di Karang Unarang oleh Tentara Laut Diraja Malaysia dan *Marine Police* pada tanggal 1 April 2005, yang akhirnya diusir oleh 3 (tiga) pasukan katak atas permintaan Komandan Kapal Perang Indonesia (KRI) Tedong Naga.¹⁷

¹³ F.C. Zagare & D.M. Kilgour, *Perfect Deterrence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

¹⁴ R. Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*. (Princeton: Princeton University Press, 1976).

¹⁵ I. Montratama, *Analisis "Deterrence Perception" atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia Dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat (2010-2014)*. Tesis. Jakarta: Unhan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://www.merdeka.com/peristiwa/dibentak-kopaska-tentara-laut-malaysia-kabur-dari-ambalat.html>, diunduh pada 11 Agustus 2014.

- Peristiwa serempetan KRI Tedong Naga dengan Kapal Perang Diraja Malaysia (KD) Rencong sebanyak tiga kali di perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur pada tanggal 8 April 2005 pagi. Aksi tersebut terpaksa dilakukan karena KD Rencong berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan mercusuar Karang Unarang.¹⁸
- Peristiwa pengusiran KD Yu - 3508 (kapal perang Tentera Laut Diraja Malaysia/TLDM) jenis *fast attack craft - gun* pada Senin 25 Mei 2009 menjelang fajar menyingsing oleh KRI Untung Suropati yang sedang berpatroli di wilayah Ambalat.¹⁹
- Peristiwa pengusiran kapal perang Malaysia dari jenis *Fast Attack Craft* KD Baung-3509 pada tanggal 30 Mei 2009 di sebelah tenggara mercusuar Karang Unarang oleh KRI Untung Suropati-872.²⁰
- Peristiwa pengusiran pesawat CN-235-220 TUDM dengan nomor lambung M44-05 10.32 WITA pada tanggal 21 Maret 2012 yang mendekati lokasi Karang Unarang oleh pesawat patroli TNI-AL jenis Casa NC-212-200 bernomor P-851.²¹

Masih banyak peristiwa pelanggaran kedaulatan lain yang terjadi di sekitar Karang Unarang dan Blok Laut Ambalat (BLA) oleh tentara maupun polisi laut Malaysia. Hal ini mengancam kepentingan nasional Indonesia. Konstitusi Indonesia mengharuskan Indonesia menjaga segenap tumpah darah dan kedaulatannya. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang atas sengketa Blok Laut Ambalat yang kaya minyak bumi.²²

¹⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_penyerempetan_kapal_Indonesia_dan_Malaysia_2005, diunduh pada 11 Agustus 2014.

¹⁹ <http://news.detik.com/read/2009/05/26/100438/1137151/10/usir-armada-malaysia-di-ambalat-armada-tni-al-debat-di-radio>, diunduh pada tanggal 11 Agustus 2014.

²⁰ <http://beritahankam.blogspot.com/2009/05/kapal-malaysia-langgar-wilayah-nyaris.html>, diunduh pada 12 Agustus 2014.

²¹ <http://www.tandef.net/cn-235-tudm-lintasi-karang-unarang-ambalat-diusir-nc-212-tni-al>, diunduh pada 11 Agustus 2014.

²² Menurut I.D. Haryono, *Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat*, 2006, hlm.1, kandungan minyak bumi di BLA senilai rp. 4.200 trilyun, dalam <https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/ambalat.pdf>, diunduh pada 1 April 2015.

Kedua negara sudah menjadi *net importer* minyak.²³ Klaim Malaysia atas Blok Laut Ambalat didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu:²⁴

1. Peta wilayah kedaulatan Malaysia yang dilansir pada tahun 1979.
2. Hasil keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di tahun 2002.

Sementara dari pihak Indonesia, klaim didasarkan pada :²⁵

1. Konvensi antara Kerajaan Britania dan Kerajaan Belanda di tahun 1891.
2. Kesepakatan UNCLOS pada pasal 13 LOSC yang menentukan “... *area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide. Where a low-tide elevation is situated wholly or partially at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low-water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea.*” Menurut pasal ini, Indonesia berhak menarik garis batas laut dari Karang Unarang, dan Indonesia memiliki kedaulatan atas Blok Laut Ambalat karena berada di ZEE Indonesia (dari penarikan garis batas dari Karang Unarang).

Menurut tesis penulis,²⁶ keberadaan sumber daya alam yang melimpah di dalam Blok Laut Ambalat mengeskalasi konflik kepentingan antara Malaysia dan Indonesia dalam penguasaan wilayah tersebut. Kedua negara telah memberikan konsesi penambangan ke pihak asing (Malaysia kepada Shell, sedangkan Indonesia kepada ENI dan Unocal). Hal ini membuat upaya diplomasi untuk mencari solusi atas sengketa kedaulatan di wilayah tersebut semakin menantang. Menurut konsepsi realis (yang melandasi paradigma esai ini): “*ci vis pacem para bellum,*” Indonesia harus menyiapkan diri

²³ Menurut <http://www.indexmundi.com/>, pada tahun 2011 selisih produksi dan konsumsi minyak Indonesia adalah 201.080 barel/hari, sedangkan Malaysia sebesar 33.280 barel/hari diunduh pada 1 April 2015.

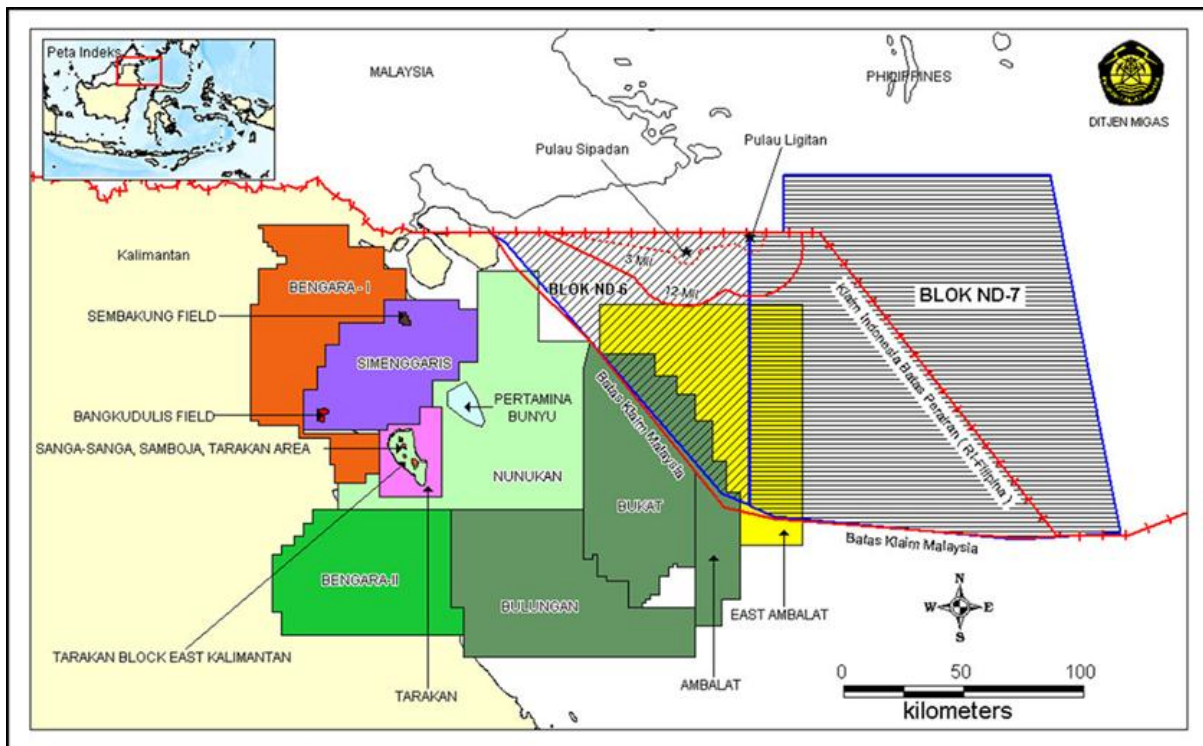
²⁴ R. Kesumawardhani, *Dispute between Indonesia – Malaysia over Ambalat Block*, hlm.2 dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18655&val=1156>, diunduh pada 1 April 2015.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2

²⁶ I. Montratama, *Analisis “Deterrence Perception” atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia Dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat (2010-2014)*. Tesis. Jakarta: Unhan.

berperang melawan Malaysia, jika ingin memelihara perdamaian. Sedangkan kekuatan utama Malaysia berada pada aliansinya pada FPDA serta potensi dukungan dari Amerika Serikat. Indonesia perlu mencari upaya untuk melemahkan kekuatan relatif Malaysia tersebut.

Gambar 3. Peta wilayah sengketa Blok Laut Ambalat (daerah berbentuk jajaran genjang)



Sumber: http://cucusargindo.blogspot.com/2013_01_01_archive.html, diunduh pada 29 Desember 2014

Strategic Re-Alignment sebagai Upaya Menghadapi Aliansi

Terdapat perbedaan antara *alignment* dengan aliansi. Menurut Wilkins,²⁷ aliansi adalah bagian dari *alignment*. *Alignment* adalah organisasi multilateral yang memberi elemen keamanan kepada negara anggotanya serta harapan bersama atas dukungan pada interaksi di masa depan. Wilkins berpendapat bahwa masalah *alignment* masih *debatable* di lingkungan hubungan internasional, namun *alignment* dapat dibagi menjadi setidaknya 4 (empat) bentuk, yaitu:

²⁷ T.S. Wilkins, "Alignment, not Alliance: The Shifting Paradigm of International Security Cooperation", dalam http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_159.pdf, diunduh pada 23 Desember 2014.

(1) Aliansi

Aliansi diartikan sebagai asosiasi formal dari beberapa negara untuk penggunaan kekuatan militer, dalam keadaan tertentu, melawan negara-negara di luar asosiasi.

Aliansi mensyaratkan adanya definisi ancaman bersama dan jika ancaman tersebut hilang, maka aliansi pun akan bubar (kecuali pada kasus NATO). Contoh aliansi adalah NATO, Pakta Warsawa (yang sekarang sudah bubar), dan FPDA.

(2) Koalisi

Koalisi adalah sekelompok negara yang bersepakat pada aksi bersama menghadapi masalah tertentu pada saat tertentu tanpa komitmen untuk mempertahankan kebersamaan dalam jangka panjang. Koalisi ini bersifat *ad hoc* (sementara). Negara-negara yang terlibat koalisi memiliki kepentingan bersama yang melampaui perbedaan di antara mereka. Masalah yang dihadapi umumnya baru muncul (tidak diantisipasi sejak lama). Berbeda dengan aliansi, yang mana ancaman sudah diantisipasi dan menjadi dasar terbentuknya aliansi. Contoh koalisi adalah aksi koalisi militer:

- negara-negara barat dan Arab atas Irak –Operation Iraqi Freedom (2003)²⁸
- negara-negara barat dan UAE atas Libya – Operation Odyssey Dawn (2011)²⁹;
- negara-negara barat dan Arab atas Suriah – Operation Inherent Resolve (2014)³⁰;

(3) Komunitas Keamanan (*Security Community/SC*)

Wilkins³¹ berpendapat bahwa konsep komunitas keamanan sama dengan konsep keamanan kolektif yang merupakan suatu kerjasama dari negara-negara dalam suatu kawasan untuk memelihara perdamaian di kawasannya. Negara-negara tersebut bersepakat untuk menghindari penggunaan kekerasan dalam menangani konflik serta membangun suatu identitas bersama (*we-feeling*). Contoh komunitas

²⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq, diunduh pada 23 Desember 2014.

²⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya, diunduh pada 23 Desember 2014.

³⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/2014_military_intervention_against_the_Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant, diunduh pada 23 Desember 2014.

³¹ T.S. Wilkins, (*op.cit.*)

keamanan adalah konsep *North Atlantic Community* dan *ASEAN Political Security Community* (APSC).

(4) *Strategic Partnership* (SP)

Strategic partnership merupakan konsep yang muncul dari dunia bisnis dan diinisiasi masuk dalam hubungan internasional untuk menjelaskan hubungan bilateral Moskow dan Beijing pada tahun 1996. Definisi dari *strategic relationship* adalah kolaborasi terstruktur antar negara (atau aktor lain) untuk memanfaatkan peluang ekonomi atau untuk merespon tantangan keamanan secara bersama. *Strategic Partnership* dapat bersifat bilateral, maupun multilateral. *Strategic partnership* dibangun terutama karena kepentingan bersama, walau tanpa dilandasi *shared value*. *Strategic partnership* utamanya dibangun karena tujuan bersama (*goal driven*), bukan karena ancaman bersama (*threat driven*). Ancaman berupa negara lain biasanya belum terdefinisikan. Namun ancaman lebih dimaksudkan pada isu keamanan bersama seperti: terorisme, separatisme, fundamentalisme agama, dan lain sebagainya.

Wilkins³² menyadari bahwa belum adanya kesepakatan dalam hubungan internasional tentang bentuk-bentuk *alignment*. Masih ada bentuk lain yang belum masuk dalam 4 (empat) bentuk *alignment* di atas seperti: *entente*, pakta non-agresi, dan *spheres of influence*. Namun esai ini membatasi bentuk *alignment* hanya pada 4 (empat) bentuk di atas. Liska³³ berpendapat bahwa *alignment* cenderung terbentuk manakala suatu negara yakin bahwa upaya perimbangan kekuasaan akan gagal. Kegagalan tersebut dikarenakan pembentukan poros kekuatan yang tersedia tidak membuat negara tersebut bebas dari ancaman. Akibatnya, upaya perimbangan kekuasaan menjadi tidak relevan lagi. Yang lebih efektif dalam menetralsir ancaman adalah melakukan *alignment* dengan kekuatan-kekuatan, termasuk kekuatan di dalam aliansi musuh, agar kekuatan ancaman dapat dilemahkan. Fleksibilitas dan kreativitas dari *alignment*, membuat bentuk kerjasama ini dapat di-“mainkan” sesuai dengan dinamika politik kontemporer. Hal senada disampaikan

³² T.S. Wilkins, *Ibid*.

³³ G. Liska, *Nation in Alliance: the Limit of Interdependence*, (Baltimore: Johns Hopkins Press : 1962).

Snyder³⁴ yang menyatakan bahwa *alignment* secara konstan berubah dengan perubahan pola kekuasaan, kepentingan dan prioritas isu.

Sementara itu Walt³⁵ berpendapat bahwa aliansi dapat melemah, yang disebabkan oleh tiga alasan, yaitu:

(1) Perubahan persepsi atas ancaman;

Aliansi dibangun untuk merespon suatu ancaman yang dipersepsikan bersama oleh sekelompok negara dalam aliansi. Manakala persepsi (dari satu atau lebih negara anggota aliansi) atas ancaman tersebut berubah, maka keberadaan aliansi menjadi tidak relevan lagi. Tidak ada lagi musuh yang dijadikan alasan pembentukan aliansi (setidaknya bagi satu atau lebih negara anggota aliansi). Sehingga aliansi dapat saja bubar sama sekali atau terbentuk aliansi baru yang terdiri dari negara-negara yang masih menganggap adanya musuh bersama.

(2) Menurunnya kredibilitas aliansi;

Aliansi juga dibangun untuk menjadi *psychological deterrent* bagi potensi musuh. Namun jika aliansi sama sekali tidak memberi ancaman signifikan bagi potensi musuh, maka eksistensi aliansi tersebut juga menjadi tidak relevan lagi. Atau jika satu atau lebih negara anggota terlibat konflik dengan musuh bersama, namun negara-negara anggota aliansi lainnya memilih untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut, maka kredibilitas aliansi akan runtuh.

(3) Perubahan politik domestik negara anggota aliansi.

Perilaku suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh elit birokrasi di negara tersebut. Manakala terjadi perubahan rezim kekuasaan politik di satu negara anggota aliansi dan rezim yang baru memiliki persepsi ancaman yang sama sekali berbeda atas negara lain (yang selama ini dianggap sebagai negara potensi lawan), maka eksistensi aliansi juga menjadi tidak relevan lagi. Rezim baru tersebut dapat saja memutuskan untuk menarik keanggotaan negaranya dari aliansi tersebut.

³⁴ G. H. Snyder, *Alliance Politics*, (Ithaca: Cornell University Press, 1997).

³⁵ S.M. Walt, "Why Alliance Endure or Collapse", *Survival*, Vol. 39.No. 1, Spring 1997, hlm. 156-179.

Tulisan ini ingin mengkaji 3 (tiga) bentuk *alignment* non-aliani (koalisi, *strategic partnership*, *security community*) yang dapat dibangun Indonesia dalam konteks menetralkan kekuatan aliansi Malaysia dalam FPDA. Kerangka berpikir esai ini disajikan pada ilustrasi di bawah ini:

Gambar 4. Alignment melawan Aliansi



Sumber: Gambar diolah sendiri oleh penulis

Drs. Mohammad Hatta³⁶ dalam pidatonya yang berjudul "Mendayung di antara Dua Karang" pada tahun 1948 di muka sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) mengamanatkan: *"Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka seluruhnya."* Pidato ini yang mempengaruhi bentuk politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Indonesia tidak mungkin beraliansi dengan kekuatan besar dalam bipolar di masa Perang Dingin. Namun dalam era pasca Perang Dingin kontemporer, dimana Amerika Serikat menjadi hegemon dan munculnya kekuatan-kekuatan besar lain yang berpengaruh seperti Cina, India, Rusia, Jepang, Australia, Brazil, dan sebagainya, Indonesia perlu mempertimbangkan bentuk *alignment* lain, yaitu: koalisi, *strategic partnership* dan *security community*, sebagai bentuk perimbangan ancaman (*balance of threat*) menghadapi kekuatan relatif Malaysia dalam FPDA.

³⁶ <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>, diunduh pada 23 Desember 2014.

Strategic Re-Alignment seperti Apa?

Situasi geopolitik pada saat ini, Amerika Serikat masih menjadi hegemon di bidang politik, militer dan teknologi selepas Perang Dingin (unipolar). Namun kecenderungan ke arah multipolar semakin nyata. Terutama di bidang ekonomi dengan menguatnya Cina, Rusia, India, Uni Eropa, Jepang, dan Brazil.

Dalam konteks melemahkan kekuatan relatif Malaysia dalam FPDA, esai ini mencoba untuk membahas kemungkinan pembentukan 3 (tiga) *alignment* non-aliansi (koalisi, *strategic partnership* dan *security community*) yang memiliki *hidden agenda* pelemahan kekuatan aliansi FPDA melalui: perubahan persepsi ancaman, penurunan kredibilitas FPDA, dan pemanfaatan perubahan politik domestik negara berpengaruh.

1) Koalisi

Koalisi dibangun oleh beberapa negara untuk sementara (*ad hoc*) dalam menghadapi suatu masalah bersama (yang tidak terantisipasi sebelumnya). Masalah bersama tersebut dianggap sedemikian penting yang mengalahkan segala perbedaan diantara negara-negara dalam koalisi. Untuk kasus Indonesia, koalisi yang mungkin dapat dibangun adalah yang menyangkut isu keamanan kontemporer, seperti: *people smuggling*, *counter-terrorism*, *transnational organized crime*, kebakaran hutan dan bencana alam.

a) *People Smuggling*

Dalam isu *people smuggling* di kawasan Asia Tenggara, Australia menjadi negara tujuan para imigran gelap. Australia sangat membutuhkan negara tetangganya, terutama Indonesia, untuk melakukan upaya penghadangan arus imigran gelap agar tidak masuk ke wilayah Australia. Sementara Australia merupakan negara anggota FPDA yang sangat berpengaruh. Indonesia perlu membangun koalisi dengan Australia dan negara tetangga lain untuk isu penanganan *people smuggling*. Harapannya akan terbentuk suatu hubungan bilateral yang saling menguntungkan, dimana Australia tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman. Koalisi penanganan *people smuggling* ini juga diharapkan akan menyebabkan kredibilitas FPDA melemah. Ikatan koalisi Indonesia dan Australia yang kuat akan

menyebabkan Australia berada dalam posisi sulit untuk berkonflik dengan Indonesia demi membantu Malaysia.³⁷ Masalah imigran gelap merupakan isu keamanan penting Australia. Sehingga jika Indonesia mampu mengambil peranan dalam penanganannya, Indonesia akan mendapat tempat penting dalam bagi politik domestik di Australia. Koalisi Penanganan *People Smuggling* di lintas laut perairan Indonesia antara Indonesia, Australia, Malaysia, Timor Leste, dan negara lain yang memiliki kepentingan atas isu imigran gelap tersebut akan memberi nilai strategis bagi Indonesia dalam menghadapi aliansi FPDA.

b) *Counter Terrorism*

Terorisme merupakan isu keamanan yang mendapat prioritas utama di hampir seluruh negara. Indonesia termasuk negara yang rawan terhadap tindakan teror dan proses radikalisasi. Koalisi penanggulangan terorisme menjadi sesuatu yang relevan dan penting. Koalisi tersebut dapat ditujukan untuk kegiatan intelijen, pelatihan pasukan anti teror, dan penanganan teror sendiri. Dengan dibangunnya koalisi ini, diharapkan persepsi negara-negara dalam FPDA akan berubah terhadap Indonesia. Indonesia dianggap membantu negara-negara anggota FPDA memitigasi ancaman non tradisional (berupa terorisme). Hubungan yang saling membutuhkan dalam koalisi tersebut diharapkan akan mengurangi kredibilitas FPDA sebagai aliansi militer. Peran Indonesia dalam menangani isu terorisme tentu akan memberi dampak positif dari elemen politik domestik dari masing-masing negara anggota FPDA. Sehingga dari partai manapun yang memimpin (negara-negara anggota FPDA), Indonesia akan selalu mendapat dukungan positif. Terlebih Australia yang pada bulan Desember 2014 mengalami peristiwa teror, berupa penyanderaan pengunjung cafe di Sydney selama 6 jam. Peristiwa tersebut juga menumbuhkan kesadaran masyarakat Australia bahwa terorisme tidak identik dengan agama (Islam). Tindakan kekerasan akibat paham radikal juga meliputi keyakinan lain selain Islam.

³⁷ Australia dan Indonesia telah meratifikasi Lombok Treaty.

c) *Transnasional Organized Crime*

Transnational Organized Crime sudah menjadi isu keamanan bagi Indonesia. Hampir tiap negara punya kepentingan untuk menanganinya. Indonesia dapat mengajak negara-negara terkait untuk membangun koalisi penanganan *transnational organized crime*. Isunya dapat lebih spesifik seperti isu *money laundering, drug trafficking, intellectual property right piracy*, dan penanganan perompak di Selat Malaka atau Laut Sulawesi. Banyak negara yang berkepentingan untuk terlibat dalam koalisi ini seperti Malaysia, Filipina, Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, dan sebagainya. Tujuan dari koalisi ini selain untuk memitigasi ancaman *transnational organized crime*, juga untuk menciptakan interdependensi dari negara-negara anggota koalisi (yang diupayakan melibatkan Amerika Serikat dan negara anggota FPDA). Harapannya, persepsi negara FPDA atas Indonesia akan lebih positif, dan menganggap Indonesia bukanlah ancaman (sehingga menjatuhkan kredibilitas FPDA). Elemen politik domestik negara FPDA juga tentu akan selalu suportif terhadap Indonesia. Walaupun dari kalangan partai oposisi sekalipun.

d) Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan pada musim kering di Indonesia telah menjadi isu lingkungan yang bersifat regional. Asap kebakaran hutan dari daerah Riau dan Kalimantan Barat mencapai wilayah Malaysia dan Singapura. Asap itu tidak hanya mengganggu kesehatan namun juga mengganggu navigasi penerbangan. Koalisi penanggulangan kebakaran hutan untuk negara terkait (seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura—dan bahkan Australia) seharusnya akan mendapat respon positif. Kolaborasi satuan kerja tiga negara diharapkan akan mampu menanggulangi kebakaran hutan. Harapannya, negara-negara terkait akan menganggap Indonesia sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah atau ancaman. Kredibilitas FPDA juga diharapkan akan runtuh dengan adanya koalisi penanggulangan kebakaran hutan. Kebakaran hutan memang tidak layak untuk dipolitisasi. Namun Indonesia dapat mengelola kebakaran hutan tersebut sedekimian rupa

sehingga akan menumbuhkan semangat kerjasama antar negara yang bersifat saling membutuhkan. Komunikasi yang efektif diperlukan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan inisiatifnya dalam memitigasi bencana kebakaran hutan. Akibatnya, Indonesia akan mendapat simpati dari segenap elemen politik di negara-negara anggota FPDA (yang membuat kekuatan aliansi FPDA dapat dilemahkan).

e) Bencana Alam

Kawasan Asia Tenggara merupakan daerah yang rawan bencana alam. Baik yang dipicu elemen meteorologi (banjir, angin puting, atau longsor), ataupun elemen geologi (gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus). Koalisi penanggulangan bencana di wilayah Asia Tenggara akan menarik minat banyak negara. Jika Indonesia mampu menunjukkan peran aktif dalam kegiatan koalisi tersebut, persepsi banyak negara terhadap Indonesia akan lebih positif. Kredibilitas FPDA sebagai *psychological deterrent* pun diharapkan melemah. Karena negara-negara anggota FPDA selain Malaysia lebih cenderung untuk mempertahankan persahabatan dengan negara yang saling membantu (di saat terjadi musibah bencana). Namun karena wilayah Indonesia yang relatif lebih luas dibanding negara lain di kawasan, bisa jadi bencana alam lebih sering terjadi di Indonesia. Sehingga justru Indonesia yang lebih banyak dibantu negara lain. Hal itu yang membuat Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus mampu menyiapkan *task force/unit* reaksi cepat tanggap bencana, yang dapat digerakkan setiap saat, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Setiap ada kesempatan kita membantu penanggulan bencana di negara tetangga harus dimanfaatkan. Karena penanggulan bencana merupakan bagian dari diplomasi pertahanan.

2) Security Community

Pada deklarasi ASEAN Concord II di Bali tahun 2003, telah disepakati pembentukan ASEAN Political Security Community (APSC)³⁸ sebagai satu dari tiga pilar ASEAN Community pada tahun 2015. Dalam *blue print* APSC pasal B.2.20-21 disebutkan:

”Convinced that the settlement of differences or disputes should be regulated by rational, effective and sufficiently flexible procedures, avoiding negative attitudes, which might endanger or hinder cooperation, ASEAN promotes the TAC, which seeks to preserve regional peace and harmony and prescribes that Member States refrain from threat or use of force. The TAC gives provision for pacific settlement of disputes at all times through friendly negotiations and for refraining from the threat or use of force to settle disputes. The strategies for conflict resolution shall be an integral part of a comprehensive approach. The purpose of these strategies shall be to prevent disputes and conflicts from arising between ASEAN Member States that could potentially pose a threat to regional peace and stability.”

Artinya, jika APSC dapat dijalankan, potensi konflik bersenjata antara Malaysia dan Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Negara-negara dalam sengketa harus mencari penyelesaian secara damai, demi memelihara perdamaian di kawasan.

Keberadaan komunitas keamanan ini akan merubah persepsi negara-negara anggota FPDA bahwa Indonesia bukan lagi ancaman. Walaupun jika melihat sejarah, kebijakan luar negeri Perebutan Irian Barat pada tahun 1962, Konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963–1966, dan Aneksasi Timor Timur pada tahun 1974 dapat memberi kesan agresivitas Indonesia. Namun politik dalam negeri Indonesia telah berubah. Sejak reformasi politik baik di zaman Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, politik luar negeri Indonesia lebih bersifat pasifis dengan perspektif yang cenderung liberalis. Doktrin pertahanan negara bersifat defensif, tidak ada intensi politik untuk melakukan ekspansi. Bahkan sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dengan Malaysia pun dapat diselesaikan melalui mahkamah internasional di tahun 2002. Sehingga selain persepsi akan Indonesia yang seharusnya berubah,

³⁸ <http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf>, diunduh pada 24 Desember 2014.

keberadaan FPDA seharusnya sudah tidak relevan lagi. Harapannya, keberadaan APSC ini dapat membuat kredibilitas FPDA menjadi runtuh.

Jika Malaysia bertindak agresif, maka Indonesia dapat mengajukan keberatan di forum ASEAN. Sehingga masyarakat ASEAN akan turut memberi “tekanan sosial” atas perilaku yang melanggar norma *aminty* dan *cooperation*. Peran serta aktif Indonesia dalam APSC diharapkan juga akan memberi kesan lebih positif kepada elemen politik domestik di negara-negara anggota FPDA. Indonesia diharapkan dapat selalu memiliki peluang untuk melakukan lobi politik untuk menggalang dukungan dari negara-negara FPDA non Malaysia untuk mencari solusi damai, jika terjadi eskalasi konflik dengan Malaysia.

3) *Strategic Partnership*

Bentuk *alignment* ini sangat lentur. Namun wujud kolaborasinya dapat sangat terstruktur menyerupai aliansi. Contohnya adalah hubungan Rusia dan Cina yang dapat naik dan turun sejak tahun 1996. Kerjasama ekonomi dan pertahanan kedua negara sangat kuat dan menyerupai aliansi. Namun kedua negara tidak mengikat secara politik. Hal sama terjadi antara Amerika Serikat dengan Singapura. Hubungan bilateral keduanya di bidang militer bahkan lebih erat dibandingkan hubungan militer antara Amerika Serikat dengan dua negara aliansinya di Asia Tenggara: Thailand dan Filipina. Namun Singapura tetap secara politik memiliki kebebasannya, termasuk dalam menjalin hubungan baik dengan Cina dan Rusia.

Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membentuk *strategic partnership* dengan dengan negara yang sangat berpengaruh pada FPDA, yaitu Amerika Serikat. Dalam situasi unipolar saat ini, Indonesia akan mendapat manfaat politik jika dapat memiliki kemitraan strategis dengan hegemon di bidang politik dan militer. Hubungan itu dibangun sedemikian rupa sehingga Indonesia masih memiliki kebebasan dalam menjalin hubungan baik dengan negara besar lain yang bersaing pengaruh dengan Amerika Serikat seperti Cina dan Rusia.

Kemitraan strategis dengan Amerika Serikat sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2010 diratifikasinya *Comprehensive Partnership Arrangement (CPA)*³⁹. Khusus

³⁹ A. Sullivan, "Strengthening U.S.-Indonesia Defense Ties", *Asia Strategy Series*, (Washington, D.C.: Center for a New American Security, 2014).

untuk bidang pertahanan, Indonesia dan Amerika Serikat telah meratifikasi *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the Field of Defense* atau *Defense Framework Arrangement (DFA)* pada bulan Juni 2010⁴⁰ antara Menhan RI dan Menhan AS. Keinginan AS untuk bermitra dengan Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintahan Obama sejak tahun 2011 untuk lebih memberi perhatian kepada Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama kebijakan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing toward Asia*⁴¹ sebagai respon atas kebangkitan Cina sebagai kekuatan besar di Asia Pasific. Wujud dari kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi.

Kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan suatu pengimbang aliansi FPDA yang efektif. Hal ini dikarenakan hampir semua negara aliansi FPDA merupakan mitra dekat Amerika Serikat. Inggris dan Australia adalah aliansi AS. Singapura dan Selandia Baru adalah mitra strategis AS. Malaysia pun juga menjadi mitra dekat AS. Jika Indonesia ingin memiliki kekuatan relatif yang lebih baik dari Malaysia, maka Indonesia harus membangun hubungan yang lebih erat dengan AS, dibandingkan hubungan AS dengan Malaysia.

Namun sayangnya, kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat sejak tahun 2010 seakan tidak memiliki kemajuan berarti. Malah jumlah pelanggaran wilayah oleh Malaysia sepanjang tahun 2010 hingga saat ini justru bertambah. Artinya kemitraan strategis Indonesia dan AS tidak memberi daya tangkal kepada Malaysia. Perlu adanya pengkajian kembali atas apa yang telah dilakukan dalam kemitraan tersebut dan apa yang harus dilakukan selanjutnya (dalam bentuk *road map*), untuk meningkatkan daya tangkal Indonesia dalam kemitraan tersebut.

Kemitraan strategis Indonesia dan AS jangan disikapi secara sentimental. Namun harus rasional dan pragmatis seperti pandangan Bung Hatta. Kemitraan strategis dengan AS bukan berarti Indonesia menutup diri dalam berhubungan diplomasi dengan negara kompetisi AS, seperti Cina dan Rusia. Bahkan AS

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Manyin, M.E. et al. (N/A), "Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia", Washington D.C.: Congressional Research Service.

merupakan mitra perdagangan utama Cina dan satu negara aliansi AS, Thailand, bahkan dapat membuat kemitraan strategis dengan Cina. Vietnam yang dahulu merupakan musuh AS, sekarang pun sedang berupaya membangun kemitraan strategis dengan AS.⁴²

Tidak ada alternatif lain untuk kemitraan strategis bagi Indonesia sebaik dengan AS. Cina yang walaupun ekonomi dan kekuatan militernya tengah bangkit, namun tetap saja masih jauh dibawah kekuatan hegemoni AS. Selain itu, Cina tengah terkepung secara politik oleh kekuatan AS dan pendukungnya, yaitu: Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, Australia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan (mungkin) Vietnam. Jika Indonesia memilih bermitra secara politik dan keamanan dengan Cina, maka Indonesia harus berseberangan dengan 9 (sembilan) negara tersebut di atas (plus dengan AS).

Tantangan yang terberat dalam membangun *strategic partnership* ada pada politik domestik. Masih banyak pihak di Indonesia yang berpendapat bahwa politik bebas aktif diartikan bebas dari segala bentuk *alignment* (*non alignment policy*). Namun jika dipelajari pidato Drs. Mohammad Hatta⁴³ pada tahun 1948 di muka sidang BPKNP, beliau mengamanatkan Indonesia untuk menjadi subjek dan bukan objek dari persaingan politik dunia. Perilaku menjadi subjek pun harus realistik dan bukan sentimentil. Artinya *alignment* tidak diharamkan. Seperti yang beliau sebutkan dalam pidatonya, Sovyet Rusia pun pada tahun 1939 pernah melakukan *alignment* dengan Nazi Jerman (yang merupakan potensi musuh) karena hendak melakukan konsolidasi kekuatan pertahanannya. Dengan *alignment* tersebut, Sovyet Rusia dapat terhindar untuk sementara waktu dari konflik dengan Nazi Jerman.⁴⁴

⁴² David J. Berteau, Michael J. Green, Zack Cooper, *Assessing Asia-Pacific Rebalance*, CSIS, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2014).

⁴³ <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>, diunduh pada 23 Desember 2014.

⁴⁴ *Ibid.*, petikan pidato terkait : "Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mentjapai kedudukan negara jang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional jang ada itu untuk mentjapai tudjuan nasional sendiri. Belanda berbuat begitu, ja segala bangsa sebenarnja berbuat sematjam itu, apa sebab kita tidak akan melakukannya? Tiap-tiap orang diantara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapiperdjoangan bangsa tidak bisa dipetjah dengan menuruti simpati sadja, tetapi hendaknja didasarkan pada realitet, kepada kepentingan negara kita setiap waktu. Sovjet Russia sendiri member tjontoh kepada kita, 148 Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1

Kesimpulan

Strategic Re-alignment yang ditawarkan dalam esai ini menyangkut pembangunan hubungan bilateral, regional dan multilateral yang lebih terarah dengan negara-negara berpengaruh; dengan tujuan untuk membangun hubungan yang saling tergantung (interdependensi) yang dapat meneralisir kekuatan relatif Malaysia dalam FPDA. Walau perspektif penulisan ini adalah neorealis, namun esai ini mendemonstrasikan bahwa bentuk *alignment* yang ditawarkan serupa dengan yang ditawarkan oleh kaum neoliberalis. Sebagai rangkuman, bentuk *alignment* yang ditawarkan di esai ini, dapat dilihat di tabel berikut ini :

Bentuk <i>Alignment</i>	Dengan Siapa?	Merubah Persepsi Ancaman	Menurunkan Kredibilitas FPDA	Mengambil Keuntungan dari Perubahan Politik Domestik
Koalisi:				
<i>people smuggling</i>	Terutama dengan Australia, Timor Leste dan Malaysia. Jangka waktunya hingga isu <i>people smuggling</i> melalui laut berkurang drastis.	Diharapkan persepsi negara-negara aliansi FPDA berubah terhadap Indonesia. Indonesia bukanlah ancaman. Tapi mitra dalam menangani ancaman non tradisional	Sikap agresif sepihak Malaysia jika sekiranya tidak didukung oleh negara aliansi FPDA lain, akan menurunkan kredibilitas FPDA.	Australia merupakan negara yang sangat berkepentingan dengan <i>people smuggling</i> . Peran aktif Indonesia akan menarik simpati dari seluruh elemen politik domestik Australia.
<i>counter-terrorism</i>	Terutama dengan Amerika Serikat, Australia, Singapura dan	Peran serta aktif Indonesia dalam koalisi pemberantasan terorisme diharapkan akan merubah persepsi anggota	Interdependensi yang akut untuk menangani terorisme diharapkan akan	Sikap proaktif Indonesia dalam penanggulangan terorisme secara multilateral akan

bahwa politik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen belaka, tetapi dengan realitet dan dengan logika jang rasionil. Dalam tahun 1935, tatkala Sovjet Russia menghadapi arus fascis, ia merobah haluannya jang radikal jang menentang negara-negara demokrasi Barat, dan mengandjurkan kepada kaum komunis diluar Russia untuk memberhentikan serangannya kepada pemerintah-pemerintah kapitalis dan beserta dengan mereka mengadakan suatu volksfront-politik untuk menentang fascis. Malahan kepada bangsa-bangsa jang terdjajah diwaktu itu diandjurkan supaja mengurangkan perdjoangannya jang tadjam menentang imperialisme kolonial, melepaskan sementara waktu tjita2 kemerdekaan, dan membantu memperkuat voksfront jang diandjurkan tadi. Dalam tahun 1939 Sovjet Russia mengadakan perdjandjian non-agresi dengan Nazi-Djerman, dan dengan perdjandjian itu Russia selama 18 bulan terpelihara daripada serangan dari Hitler; sementara itu ia dapat memperkuat alat pertahanannya. Timbangan jang rasionil memaksa Sovjet Russia mengadakan perdjandjian dengan musuhnya. Dan apabila politik hanja didasarkan kepada sentimen, jang sedemikian itu tentu tidak mungkin terdjadi."

	Inggris. Koalisi dapat berlangsung lama, sejalan dengan sifat terorisme yang laten	FPDA. Ancaman bukan pada Indonesia, melainkan pada ancaman non tradisional.	menjadi <i>switching cost</i> tersendiri bagi negara anggota FPDA untuk bersikap bermusuhan dengan Indonesia. Walaupun Malaysia sudah menantang Indonesia untuk berperang.	menarik simpati hampir seluruh elemen politik domestik negara anggota FPDA. Terutama Australia yang baru mengalami aksi terorisme di Sidney di bulan Desember 2014.
<i>transnational organized crime</i>	Koalisi yang lebih spesifik dapat dibangun untuk menanggulangi <i>money laundry, drug trafficking, intellectual property right piracy</i> , penanganan perompak-perompak di Selat Malaka dengan melibatkan Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dll.	Masalah sosial yang ditimbulkan <i>transnational organized crime</i> sangat nyata. Sehingga peran serta Indonesia dalam menanggulangi masalah tersebut secara regional maupun multilateral akan menumbuhkan simpati dan membuat persepsi akan Indonesia lebih positif.	Kredibilitas FPDA akan menurun jika negara-negara FPDA sudah sedemikian saling bergantung kepada Indonesia dalam menangani isu ancaman non tradisional. Diharapkan jika Malaysia menantang Indonesia, FPDA tidak akan langsung mendukung Malaysia.	Elemen politik domestik di negara-negara anggota FPDA akan selalu bersimpati pada Indonesia dalam peran Indonesia menanggapi masalah <i>transnational organized crime</i> . Indonesia akan dianggap sebagai mitra penting yang harus selalu dibina persabahanannya.
kebakaran hutan	Koalisi ini relevan dibangun dengan negara-negara yang kena imbas kebakaran hutan seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Australia. Koalisi ini bersifat <i>ad hoc</i> .	Peran Indonesia dalam menangani kebakaran hutan akan merubah persepsi. Dari sekedar kawan menjadi sahabat dekat.	Kebakaran hutan dapat seolah-olah menjadi komoditas politik. Perang terhadap kebakaran hutan akan terganggu jika FPDA mendukung Malaysia untuk berperang dengan Indonesia.	Elemen politik domestik di Malaysia, Singapura, dan Brunei mesti akan sangat bersimpati pada peran Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan.
bencana alam	Negara-negara yang <i>concern</i> terhadap koalisi ini seperti Singapura, Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Thailand. Koalisi ini	Perspektif negara-negara dalam koalisi atas Indonesia akan selalu positif. Hal ini akan melenakan persepsi bahwa Indonesia adalah ancaman tradisional.	Semakin aktif Indonesia membantu negara anggota FPDA mengatasi bencana, akan semakin tinggi rasa hutang budi negara tersebut	Rasa hutang budi juga akan meliputi elemen politik domestik di negara anggota FPDA yang pernah dibantu Indonesia.

	bersifat <i>ad hoc</i> .		kepada Indonesia yang pada gilirannya membuat kredibilitas FPDA menurun.	Sehingga dari partai manapun yang akan berkuasa, Indonesia telah menanamkan kesan simpatik kepada mereka.
Security Community	Negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN <i>Political-Security Community</i> (APSC)	APSC seharusnya akan merubah persepsi negara-negara anggotanya bahwa sesama negara anggota ASEAN adalah sahabat. Bukan potensi musuh.	Keberadaan APSC diharapkan dapat menginisiasi likuidasi FPDA. Karena sudah ada forum APSC untuk menyelesaikan sengketa antar anggota ASEAN.	APSC akan menuntut komitmen seluruh elemen politik domestik negara anggota ASEAN. Dari partai manapun pemerintah yang berkuasa, harus menyesuaikan diri dengan komitmen dalam APSC.
Strategic Partnership	Dengan Amerika Serikat sebagai hegemon di bidang Politik dan Militer	Persepsi negara-negara anggota FPDA akan berubah, manakala Amerika Serikat memiliki kemitraan strategis dengan Indonesia	Kredibilitas FPDA akan cenderung runtuh kalau Amerika Serikat bermitra strategis dengan Indonesia. Tidak ada yang ingin melawan Amerika Serikat.	Elemen politik domestik di negara-negara anggota FPDA juga akan lebih positif memandang Indonesia, sebagai mitra strategis AS. Yang penting bagi AS, akan penting juga bagi mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Jervis, R. 1976. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Liska, G. 1962. *Nation in Alliance: the Limit of Interdependence*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Snyder, G. H. 1997. *Alliance Politics*. Itacha: Cornell University Press.
- Walt, Stephen. 1987. *The Origin of Alliances*. Itacha: Cornell University Press.
- Zagare, F.C. & Kilgour, D.M. 2004. *Perfect Deterrence*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Benson, B.V. 2013. Bentley, P.R., Ray, J.L. "Ally Provocateur: Why Allies Do Not Always Behave". *Journal of Peace Research*. Vol. 50. No. 1.
- Thayer, C.A. 2007. The Five Power Defence Arrangements: The Quiet Achiever. *Security Challenges*. Vol. 3. No. 1.
- Walt, S.M. 1997. "Why Alliance Endure or Collapse". *Survival*. Vol. 39. No. 1.

Tesis

- Montratama, I. 2014. *Analisis "Deterrence Perception" atas Kemampuan Alat Utama Sistem Senjata Malaysia Dihadapkan dengan Indonesia Dalam Konteks Pengendalian Blok Laut Ambalat (2010-2014)*. Tesis. Jakarta: Unhan.

Website

- Haryono, I.D, "Perspetif Malaysia tentang Sengketa Ambalat", 2006,
<https://indronet.files.wordpress.com/2007/09/ambalat.pdf>, diunduh pada 1 April 2015.
- <http://beritahankam.blogspot.com/2009/05/kapal-malaysia-langgar-wilayah-nyaris.html>, diunduh pada 12 Agustus 2014.
- http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq, diunduh pada 23 Desember 2014.
- http://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya, diunduh pada 23 Desember 2014.
- http://en.wikipedia.org/wiki/2014_military_intervention_against_the_Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant, diunduh pada 23 Desember 2014.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_penyerempetan_kapal_Indonesia_dan_Malaysia_2005, diunduh pada 11 Agustus 2014.
- <http://news.detik.com/read/2009/05/26/100438/1137151/10/usir-armada-malaysia-di-ambalat-armada-tni-al-debat-di-radio>, diunduh pada 11 Agustus 2014.
- <http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf>, diunduh pada 24 Desember 2014.
- <http://www.indexmundi.com/>, diunduh pada 1 April 2015.
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/dibentak-kopaska-tentara-laut-malaysia-kabur-dari-ambalat.html>, diunduh pada tanggal 11 Agustus 2014.

<http://www.tandef.net/cn-235-tudm-lintasi-karang-unarang-ambalat-diusir-nc-212-tni-al>, diunduh pada 11 Agustus 2014.

<https://sejarahperang.wordpress.com/2011/04/23/1237/>, diunduh pada 17 Desember 2014.

<https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/mendajung-antara-dua-karang.pdf>, diunduh pada 23 Desember 2014.

Kesumawardhani, R, "Dispute between Indonesia – Malaysia over Ambalat Block", dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18655&val=1156>, diunduh pada 1 April 2015.

Wilkins, T.S., "Alignment, not Alliance: The Shifting Paradigm of International Security Cooperation", dalam http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_159.pdf, diunduh pada 23 Desember 2014.